

KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN WANA WISATA GUNUNG GALUNGGUNG DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Iva Khopifatu S¹; Rita Myrna²; Candradewini Candradewini³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

¹iva18001@mail.ac.id ; ²myrna@unpad.ac.id; ³candradewini@unpad.ac.id

ABSTRACT

Tourism as a multidimensional sector that must be managed well by the government, private sector, community or collaborate together. Because this sector if managed properly has the potential to increase regional income as well as state foreign exchange, create jobs, improve the socio-economic level of the community, and is useful for increasing public awareness in an effort to preserve, protect and manage natural and cultural resources. Tasikmalaya Regency has unique and diverse natural characteristics that make it many natural tourist destinations such as Mount Galunggung. Mount Galunggung Tourism is one of the most favorite tourist destinations in Tasikmalaya Regency. The management of Mount Galunggung tourism is carried out by Perum Perhutani with the help of the surrounding community which are called Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Its management has been done for a long time, but its development is still relatively slow. This study aims to determine and analyze how management through collaborative relationships is carried out between Perum Perhutani and Koparga by using collaboration process theory through systems analysis platform according to Vigoda & Gilboa (2002). In the process of this research using qualitative methods by going through the interview process with informants using purposive sampling technique, field observations and supported by research supporting documents. The results of this study explain that the management of Mount Galunggung tourism through collaborative relationships shows good results, but there are still some things that are not done as in the PKS (Perjanjian Kerjasama) such as Koparga's goal to help Perum Perhutani increase revenue, but the realization has never reached the annual target that has been determined and mutually agreed upon. In addition, the goal of Perum Perhutani in community empowerment is still not maximized, because there are still many Koparga members who do not understand their rights and obligations. Mount Galunggung tourism area is a destination that has the potential to become a better tourist destination in the future. With a note that management can be improved, especially in the collaboration process between Perum Perhutani and Koparga.

Keywords: Collaboration, PKS, Perum Perhutani, Koparga and Mount Galunggung Tourism.

ABSTRAK

Pariwisata sebagai sektor multidimensi yang mesti di kelola dengan baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat maupun dengan cara kolaborasi bersama-sama dengan pihak lain. Jika sektor pariwisata dikelola dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat, serta bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan, melindungi dan mengelola sumberdaya alam maupun budaya sekitar. Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik alam yang unik dan beragam sehingga menjadikannya banyak destinasi wisata alam seperti Gunung Galunggung. Wisata Gunung Galunggung merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit di Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan wisata Gunung Galunggung dilakukan oleh Perum Perhutani dengan bantuan dari masyarakat sekitar yang di berada dalam suatu wadah yang di sebut Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Dalam pengelolaannya sudah dilakukan sejak lama, namun dalam perkembangannya masih relatif lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan melalui hubungan kolaborasi yang dilaksanakan antara Perum Perhutani dan Koparga dengan menggunakan teori proses kolaborasi melalui platform analisis sistem yang dikemukakan oleh Vigoda & Gilboa (2002). Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melalui proses wawancara dengan informan menggunakan teknik purposive sampling, observasi lapangan dan didukung dokumen pendukung penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung melalui hubungan kolaborasi menunjukan hasil yang cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan sebagaimana dalam PKS (Perjanjian Kerjasama) seperti tujuan Koparga untuk membantu Perum Perhutani dalam meningkatkan pendapatan, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target tahunan yang sudah di tentukan dan disepakati bersama. Selain itu, tujuan Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya anggota Koparga yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Wana wisata Gunung Galunggung merupakan destinasi yang sangat memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata yang lebih baik kedepannya. Dengan catatan dalam pengelolaannya bisa lebih dibenahi dan diperbaiki, terutama dalam proses kolaborasi antara Perum Perhutani dan Koparga.

Kata kunci: Kolaborasi, PKS, Perum Perhutani, Koparga dan Wana Wisata Gunung Galunggung.

PENDAHULUAN

Pariwisata sebagai sektor yang multidimensi, sangat potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar dapat melestarikan dan melindungi budaya dan warisan sumberdaya alam. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Indonesia memperkuat regulasi tentang kepariwisataan sebagai langkah awal untuk mengembangkan dan dasar hukum dalam pengelolaan sektor pariwisata. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka untuk menindaklanjuti perkembangan pariwisata Indonesia ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025. Selain itu, salah satu prinsip yang tertera dalam Undang-Undang tersebut yaitu pariwisata dapat diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat, hal ini sejalan dengan proses pengelolaan pariwisata di Indonesia yang sudah banyak dilakukan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam prosesnya dapat dilakukan melalui keterpaduan atau kolaborasi, kerjasama antarsektor, kerjasama antardaerah dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Barat dengan daerah seribu bukit. Jika dilihat dari kondisi alam yang dimiliki, menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah dengan potensi wisata yang lengkap mulai dari Gunung Galunggung, air terjun atau curug, wisata pantai dan destinasi wisata lainnya. Berdasarkan data destinasi wisata dan jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Gunung Galunggung merupakan salah satu destinasi wisata favorit dan unggulan. Terdapat dua pihak pengelola dalam pengelolaan objek wisata Gunung Galunggung, pihak pengelola pertama yaitu Perum Perhutani dan pihak pengelola kedua yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakilkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam proses pengelolaannya kedua pihak tersebut melakukan kerjasama dengan melibatkan pihak lain yaitu masyarakat sekitar, realitas tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti Kawasan Gunung Galunggung. Pengelola pihak pertama yaitu Perum Perhutani yang mengelola wilayah wana wisata Gunung Galunggung seluas 276,02 Ha yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dengan luas 16,527 Ha, Kawasan Cipanas Galunggung 4Ha dan Kawah Galunggung seluas +30 Ha. Perum Perhutani dalam mengelola wilayah wana wisata Gunung Galunggung diwakilkan oleh divisi ekowisata KBM Ecotourism Jawa Barat dan Banten. Dalam pengelolaannya Perum Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar yang diwakilkan oleh Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Kerjasama ini telah terjalin sejak tahun

2000 silam, yang mana kerjasama diselenggarakan atas dasar keputusan Menteri Negara Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah RI No.56/BH/KDK.10.15/VIII/2000. Yang kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Indonesia No. 72 tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pasal 3 ayat 5 menjelaskan bahwa pengelolaan hutan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Namun meskipun kerjasama yang terjalin sudah berlangsung selama 21 tahun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses pengelolaannya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan persetujuan yang dicantumkan dalam "Perjanjian Kerjasama" bahwa tujuan dilaksanakannya kerjasama antara Perum Perhutani dengan Koparga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perum Perhutani dan pemberdayaan masyarakat yang diwadahi oleh pihak Koparga. Namun, target pendapatan tidak pernah mencapai target selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018- 2020.

Tabel 1.1. Data Pendapatan Wana Wisata Gunung Galunggung Tahun 2018-2020

No.	Pendapatan	Tahun		
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Target Pendapatan	3.982.714.000	3.431.578.000	3.267.718.943
2.	Realisasi Pendapatan	2.659.369.000	3.316.331.000	1.953.703.000

(Sumber: Perum Perhutani, diolah oleh Penulis, 2022)

Namun meskipun kerjasama yang terjalin sudah berlangsung selama 21 tahun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses pengelolaannya dengan beberapa indikasi masalah, antara lain; 1) Sumberdaya manusia (SDM) pengelola wana wisata Gunung Galunggung masih memiliki keterbatasan dalam segi latarbelakang Pendidikan yang masih belum sesuai dengan jabatan yang diemban, 2) Lemahnya komitmen para aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung, dibuktikan dengan peran dan fungsi masing-masing pihak masih belum dilaksanakan secara optimal dan tidak tercapainya target pendapatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKS (Perjanjian Kerjasama).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu variable yaitu mengenai "kolaborasi", sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti akan melihat, memahami makna individu dan kelompok yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjelaskan terkait pelaksanaan kerjasama kolaborasi dalam pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung. Selain itu, melalui pendekatan penelitian ini peneliti berperan sebagai instrument kunci. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menggali informasi mengenai proses kolaborasi dalam pengelolaan wana wisata

Gunung Galunggung dari individu maupun kelompok berdasarkan pengalaman subyektif, pengalaman individu dan perspektif dari sudut pandang masyarakat dan pengunjung.

Untuk menganalisis penelitian mengenai kolaborasi dalam pengelolaan Wana Wisata Gunung Galunggung, menggunakan aspek-aspek yang sesuai dengan kondisi di lapangan dengan membatasi data menggunakan teori yang sudah ditentukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Vigoda & Gilboa (2002, p. 107) mengenai proses pelaksanaan kolaborasi, yaitu;

1. *Issues for Collaboration* (Isu Kolaborasi)
2. *Analyzing the Issue* (Analisis Isu Kolaborasi)
3. *Analyzing the Players* (Analisis Aktor yang Terlibat)
4. *How to Implement* (Bagaimana Melakukan Kolaborasi)
5. *Launching Implementation* (Melaksanakan/mengimplentasikan Kolaborasi)
6. *Evaluating the Process* (Evaluasi Proses Kolaborasi)

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi observasi lapangan yang mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dalam dimana informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kriteria penelitian peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data untuk memvalidasi data penelitian. Creswell (2014, p. 251) menjelaskan bahwa triangulasi sumber data merupakan proses untuk memeriksa kembali data yang sudah tersedia yang didukung dengan bukti-bukti tertentu yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam pengolahan dan analisis data berdasarkan Miles & Huberman (2014, p. 31), yaitu: Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

PENELITIAN TERKAIT

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus dan lokus penulis, yaitu “Analisis Perubahan Kelembagaan dan Dampak Pengganda (*Multiplier Effect*) pengembangan wana wisata (Studi Kasus: Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya)” oleh Hendartina, (2014), “Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata di Desa Wisata Kubu Gadang” oleh Aulia, (2021), “Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat” oleh Utami & Pancasilawan (2017), “*Barriers to Collaboration among Tourism Industry Stakeholders. Case study: Mashhad Metropolis*” oleh Azizpour & Fathizadeh (2016) dan terakhir “Kolaborasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Banten” oleh Caddith, (2019).

Selain itu, terdapat teori yang relevan untuk menunjang penelitian ini, proses kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap dan tahap ini sebagai inti dari pelaksanaan kolaborasi. Pada pelaksanaannya kolaborasi bergantung terhadap pencapaian siklus yang baik, yang dapat dicapai dengan komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dan hasil (Ansell & Gash, 2007a, pp. 558–561). Kolaborasi dikategorikan sebagai tata kelola kolaboratif dimana publik dan pihak lainnya bekerjasama secara kolektif dengan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Agranoff & McGuire (2003, p. 4) melihat dalam proses kolaborasi terdapat manajemen kolaboratif sebagai konsep yang menggambarkan proses dalam memfasilitasi dan beroperasi untuk pengaturan multiorganisasi yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan atau dapat diselesaikan dengan mudah oleh organisasi tunggal.

Pemerintah daerah merupakan tingkatan yang paling ideal untuk menarik keterlibatan warga negara dalam proses kolaborasi ini (Vigoda & Gilboa, 2002, p. 105). O’Flynn & Wanna (2008) juga menjelaskan bahwa proses kolaborasi dapat dilaksanakan pada organisasi pemerintah sebagai alternatif untuk memecahkan masalah sehingga menjadikan kolaborasi sebagai jawaban untuk menghasilkan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, kolaborasi merupakan sebuah hubungan yang dirancang untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menciptakan atau menemukan solusi dalam serangkaian batasan tertentu.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam sejarahnya, pada tahun 1986an setelah Gunung Galunggung meletus masyarakat sekitar beserta dengan pemerintah Desa Linggajati membuka kawasan wisata di kawasan bawah yang saat ini menjadi kolam pemandian air panas atau Cipanas Galunggung. Namun hal itu tidak berlangsung lama, kawasan Cipanas Galunggung pada tahun 1990an diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 2000, Perum Perhutani melalui KPH Perhutani Tasikmalaya membangun wilayah kelolaannya menjadi kawasan pemandian air panas, yang mana proses pengelolaannya dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar melalui Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Karena Gunung Galunggung memiliki 2 (dua) pengelola, maka pada akhir tahun 2004 Perum Perhutani pernah menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kerjasama ini menghasilkan kelola baru dalam pengelolaan kawasan Gunung Galunggung. Adapun hal yang dikerjasamakan adalah berupa cara memasuki wilayah Gunung Galunggung melalui *ticketing* satu pintu. Namun kerjasama tersebut tidak berlangsung lama berakhir, sehingga pada tahun 2019 kedua belah pihak mengakhiri Kerjasama tersebut. Hal ini disebabkan oleh koordinasi antar lembaga yang kurang jelas sehingga pelaksanaannya berjalan kurang

efektif. Saat ini yang bertanggung jawab untuk mengelola kawasan wana wisata Gunung Galunggung adalah Divisi Ekowisata KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri) *Ecotourism* Jawa Barat dan Banten yang diberikan wewenang oleh Perum Perhutani Jawa Barat yang hingga saat ini masih melaksanakan hubungan kemitraan dengan Koparga.

Untuk memahami proses kolaborasi dalam pengelolaan Wana Wisata Gunung Galunggung, peneliti akan menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Vigoda & Gilboa (2002, p. 107), yaitu:

1. *Issues for Collaboration* (Isu Kolaborasi)

Secara geografis gunung Galunggung masih berbentuk kawasan konservasi hutan sehingga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola, melestarikan dan mensejahterakan kawasan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pengelolaan hutan membutuhkan kemampuan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan diwiliyah tertentu dilimpahkan menjadi kewenangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Perum Perhutani diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola kawasan hutan di wilayah Jawa dan Madura. Maka dari itu Gunung Galunggung menjadi tanggung jawab Perum Perhutani dalam pengelolaanya.

Proses kolaborasi dalam pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung didasarkan untuk mengelola, melestarikan dan mengoptimalkan bisnis kehutanan berbasis wisata alam. Yang kemudian dalam prosesnya Perum Perhutani memiliki keterbatasan dalam hal sumberdaya manusia (SDM) yang mana mereka tidak dapat bekerja sendiri. Selain itu, sebagai bentuk untuk mewujudkan visi dan misi Perum Perhutani dengan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wisata melalui pemberdayaan masyarakat yang di wadahi oleh Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung (Koparga). Kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Gunung Galunggung sebagai aset negara dan memberikan kebermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Semua pihak telah menyetujui adanya hubungan kemitraan ini, adapun pihak-pihak yang menyetujui tidak hanya dari Perum Perhutani dan Koparga saja melainkan masyarakat sekitar juga sangat menyetujui dan mendukung hubungan kemitraan ini. Karena masyarakat merasa adanya kemitraan ini memberikan dampak positif dalam mendukung perputaran ekonomi mereka salahsatunya dengan diberikan kesempatan memiliki kios warung untuk berdagang di sekitar area wana wisata.

2. *Analyzing the Issue* (Analisis Isu Kolaborasi)

Kolaborasi memerlukan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur saat proses evaluasi berlangsung. Selain itu, kolaborasi memerlukan karakter kerja individu yang memiliki keinginan untuk berkomitmen dan berpartisipasi dalam setiap proses kolaborasi. Perum Perhutani sebagai aktor utama sangat berpartisipasi karena memiliki kewenangan untuk mengelola,

melestarikan dan mensejahterakan kawasan Wana Wisata Gunung Galunggung. Kemudian, Koparga sebagai pihak mitra juga sangat berpartisipasi dalam proses pengelolaannya. Adapun tujuan dari terjalinnya hubungan kolaborasi ini yaitu untuk kegiatan usaha dan Koparga sebagai pihak mitra memiliki kewajiban untuk meningkatkan pendapatan Perum Perhutani dan pemberdayaan masyarakat yang diwadahi oleh Koparga. Selain itu, Perum Perhutani juga tidak memiliki sumberdaya yang optimal sehingga memerlukan keterlibatan pihak lain dalam prosesnya. Sehingga hubungan yang terjalin sangatlah mutualisme.

Pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung dipegang penuh oleh Perum Perhutani sebagai pihak utama, sehingga sumberdana yang dikeluarkan sebagian besar menjadi tanggung jawab Perum Perhutani. Hal ini dapat dilihat dari besaran jumlah *sharing* yang diterima oleh kedua belah pihak, seperti contoh wahana bak rendam dibangun oleh Perum Perhutani maka besaran *sharing* yang diterima oleh Perum Perhutani sebesar 70% dan Koparga mendapatkan 30%. Hal ini juga tentu menjadi suatu risiko karena dalam hubungan kolaborasi ini keterlibatan dari pihak lain bukanlah dari sektor *private*, melainkan dari organisasi masyarakat yang terbentuk dalam lembaga koperasi. Sehingga Koparga tidak memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan seluruh biaya operasional sehari-hari seperti kebersihan, pembabatan rumput dan pembersihan kolam. Mereka diberikan kebebasan hanya jika ada potensi yang baik untuk dikembangkan yang didukung apabila mereka memiliki dana untuk mengembangkan potensi tersebut.

3. *Analyzing the Players* (Analisis Aktor yang Terlibat)

Kolaborasi tidak akan berjalan jika hanya dilakukan sendiri, maka dari itu keterlibatan pihak lain diperlukan untuk melaksanakan kolaborasi sebagai aktivitas jangka panjang. Untuk melakukan hubungan kemitraan dengan Perum Perhutani akan dihadapkan pada proses panjang melalui pengajuan permohonan kemitraan dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Perum Perhutani.

Adapun aktor yang terlibat dalam pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung yaitu *General Manager*, *Site Manager*, Supervisor Administrasi, Supervisor Kelola Destinasi dan Pelayanan Pengunjung, Koordinator Lapangan Kawah Galunggung, Koordinator Lapangan Cipanas Galunggung, pegawai casual dan Koparga sebagai pihak mitra yang mencakup Sekretaris, Bendahara, anggota, dan pelaku usaha disekitar area wana wisata Gunung Galunggung yaitu pemilik warung dan ojek wisata. Untuk melegalkan hubungan tersebut maka dibentuklah suatu "Perjanjian Kerjasama" yang pertama kali dilegalkan melalui keputusan Menteri Negara Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah RI No.56/BH/KDK.10.15/VIII/2000. Tetapi Perjanjian Kersama (PKS) ini tidak cukup sebagai bentuk nota kesepahaman bersama terkait kemitraan antara Perum Perhutani dan Koparga yang berlaku selamanya. Maka setelah diputuskannya perjanjian

kerjasama tersebut telah dilakukannya penyesuaian dan perpanjangan setidaknya setiap 2 (dua) tahun sekali.

4. *How to Implement* (Bagaimana Melakukan Kolaborasi)

Sebelum hubungan kolaborasi berjalan, pihak-pihak yang bersangkutan harus mengadakan diskusi terlebih dahulu untuk merundingkan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dan maksud dan tujuan dari hubungan kolaborasi ini.

Setiap pihak baik Perum Perhutani maupun Koparga telah mengetahui maksud dan tujuan dari pengelolaan Kawasan wana wisata Gunung Galunggung, yaitu:

- 1) Maksud kerjasama kolaborasi ini adalah dalam rangka kemitraan kegiatan usaha, wahana dan atraksi untuk menambah daya tarik wisata alam di Wana Wisata Kawah Galunggung dan Cipanas Galunggung;
- 2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha pihak kesatu (Perum Perhutani) dan Pemberdayaan masyarakat yang diwadahi oleh pihak kedua (Koparga).

Maksud dan tujuan diatas dijadikan acuan dalam proses pelaksanaannya, sehingga biasanya dibuat dalam rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi Perum Perhutani dan Koparga belum memiliki hal tersebut, rencana kerja yang dijalankan masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan saat itu dan menunggu arahan langsung dari Perum Perhutani pusat apabila diperlukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana. Mereka juga tidak memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) bersama yang menunjang terkait hubungan kolaborasi yang terjalin dalam pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung.

5. *Launching Implementation*

(Melaksanakan/mengimplentasikan Kolaborasi)

Pada tahapan implemementasi pelaksanaan ahwa hubungan kemitraan ini didasarkan atas tujuan Perum Perhutani sebagai pihak utama untuk memberdayakan masyarakat sekitar, dimana Koparga berperan sebagai wadah untuk Perum Perhutani dalam melaksanakan pemberdayaan tersebut. Dan tujuan lainnya yaitu untuk membantu meningkatkan pendapatan Perum Perhutani sebagai pihak utama dalam pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung.

Bentuk dari pemberdayaan tersebut yaitu dengan memberikan kebebasan kepada Koparga untuk mengembangkan potensi yang ada disekitar area wisata dan memberikan lahan untuk masyarakat menjadi pelaku usaha di sekitar area wana wisata. Kondisi warung saat ini sudah tertata rapi sejak tahun 2020 dan sudah disediakan tempat duduk yang layak dan nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Cipanas Galunggung. Kebebasan dari Perum Perhutani tersebut Koparga gunakan dengan membangun Bukit Nangre, WC umum dan sarana dan prasarana lainnya. Namun tujuan untuk meningkatkan pendapatan Perum Perhutani tidak dilakukan dengan optimal oleh Koparga

sebagai pihak mitra, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah tercapainya target pendapatan Perum Perhutani setiap tahunnya.

Tabel 2.2. Data Pendapatan Wana Wisata Gunung Galunggung tahun 2018-2020

No.	Pendapatan	Tahun		
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Target Pendapatan	3.982.714.000	3.431.578.000	3.267.718.943
2.	Realisasi Pendapatan	2.659.369.000	3.316.331.000	1.953.703.000

(Sumber: Perum Perhutani, diolah oleh Penulis, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan pengelolaan dan pengembangan dari kedua belah pihak masih sangat lambat mengingat kawasan ini sudah dikelola sejak tahun 2000. Hingga saat ini masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih belum diperbaiki dan bentuk pengelolaan yang masih monoton karena tidak adanya rencana pasti mengenai bentuk pengelolaannya.

6. *Evaluating the Process* (Evaluasi Proses Kolaborasi)

Evaluasi merupakan mekanisme umpan balik yang memberikan pilihan untuk perbaikan dan kemajuan dalam menjalankan suatu proyek maupun rencana kerja ke depannya yang berdasarkan hasil kerja atau proyek yang sama dan identik sebelumnya.

Pelaksanaan hasil evaluasi hubungan kolaborasi dalam pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung dilaksanakan secara rutin setiap 1 tahun sekali. Yang mana di dalamnya melibatkan pengurus inti Koparga yang mencakup ketua, sekretaris dan bendahara, proses evaluasi ini dilakukan oleh Perum Perhutani sebagai pihak utama pengelola wana wisata Gunung Galunggung.

Hasil evaluasi tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak belum secara optimal dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan bahwa hubungan kemitraan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan pihak kesatu yaitu Perum Perhutani dan Pemberdayaan Masyarakat yang di wadahi oleh pihak kedua yaitu Koparga. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya realisasi target pendapatan tahunan yang sebelumnya telah ditetapkan dan disepakati bersama baik dari pihak Perum Perhutani maupun dari pihak Koparga. Bahasan terkait realisasi pendapatan ini selalu dilakukan setiap tahunannya, namun pihak Koparga selaku mitra yang memiliki hak dan kewajiban untuk membantu kegiatan di wana wisata Gunung Galunggung dalam sektor peningkatan pendapatan, tetapi disayangkan pihak Koparga selalu mengalami kendala dalam memberikan *sharing* pendapatan, walaupun banyak lokasi yang diberikan untuk menambah kegiatan dari pihak Perum Perhutani kepada pihak Koparga, tetap saja selalu di bawah rencana pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya dalam pembahasan mengenai hubungan kolaborasi dalam pelaksanaan pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung, peneliti menyimpulkan bahwa secara teoritis hubungan kolaborasi antara Perum Perhutani dan Koparga telah dijalankan sesuai dengan 6 (enam) tahapan proses kolaborasi yang dimulai dari penentuan masalah untuk menjalin hubungan kolaborasi hingga evaluasi proses implementasi kolaborasi pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung. Namun dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung belum efektif. Kolaborasi tidak baik ini disebabkan karena tidak sistematis dan tidak sinergisnya peran dan fungsi dari masing-masing pihak baik Perhutani maupun Koparga. Sehingga para pihak belum maksimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan PKS (Perjanjian Kerjasama) yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik serta kurangnya evaluasi dari masing-masing pihak. Kolaborasi yang belum efektif ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari terbentuknya kolaborasi antara Perum Perhutani dan Koparga itu sendiri, yaitu tidak tercapainya target pendapatan setiap tahunnya. Tidak tercapainya pendapatan dari hubungan kolaborasi ini disebabkan karena tidak sistematis dan sinergis antara Perum Perhutani dan Koparga dalam bermitra.

REFERENSI

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Andari, R., Puspito, H., & Setiyorini, D. (2016). GREEN TOURISM ROLE IN CREATING SUSTAINABLE URBAN TOURISM. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 11(2).
- Ansell, C., & Gash, A. (2007a). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007b). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aulia, F. (2021). KOLABORASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESA WISATA KUBU GADANG. Universitas Padjajaran.
- Azizpour, F., & Fathizadeh, F. (2016). Barriers to Collaboration among Tourism Industry Stakeholders. Case study: Mashhad Metropolis. 13. <https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/5991>
- Berry, C., Krutz, S. G., Langner, E. B., & Budetti, P. (2008). *Jump-Starting Collaboration: The ABCD Initiative and the Provision of Child Development Services through Medicaid and Collaborators*. 480–490.
- Caddith, J. (2019). KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI TELUK BANTEN. Universitas Padjajaran.
- Chang, C. L., Khamkaew, T., & McAleer, M. (2012). IV estimation of a panel threshold model of tourism specialization and economic development. *Tourism Economics*, 18(1), 5–41. <https://doi.org/10.5367/te.2012.0108>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hendartina, L. N. (2014). ANALISIS PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN DAMPAK PENGGANDA (MULTIPLIER EFFECT) PENGEMBANGAN KAWASAN WANA WISATA.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (J. Saldana, Ed.; 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* ANU E Press.
- Rifad, M., Rinayanti, R., & Nurwulan, L. (2021). PENGEMBANGAN POTENSI WANA WISATA JATI PLUS PERHUTANI (JPP) 40 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Vol. 04).
- Straus, D. (2002). *How to Make Collaboration Work: Powerfull Ways to Build Consensus Solve Problem and Make Decision* (1st ed.). Berret-Koehler.
- Swaragapura.com. (2019). Wisata Galunggung Kebersihannya Kurang Diperhatikan. Swaragapura.Com. <https://www.swaragapura.com/dodi-wisata-galunggung-kebersihannya-kurang-diperhatikan/>
- Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2017). Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat.
- Vigoda, E., & Gadot. (2004). Collaborative public administration: Some lessons from the Israeli experience. *Managerial Auditing Journal*, 19(6), 700–711. <https://doi.org/10.1108/02686900410543831>
- Vigoda, E., & Gilboa, E. (2002). *Public administration : an interdisciplinary critical analysis*. Marcel Dekker.